

Peran sistem filsafat sebagai sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila

Muhammad Iqbal Ramadhani

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang

e-mail: ramadhaniiqbal645@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, sistem filsafat, sumber historis, sumber sosiologis, sumber politis, urgensi.

Keywords:

Pancasila, philosophical system, historical sources, sociological sources, political sources, urgency.

ABSTRAK

Pancasila diakui bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan sebagai suatu sistem filsafat yang fundamental. Sistem filsafat ini memberikan landasan bagi pandangan hidup, cara berpikir, dan kebijakan negara yang berakar kuat pada jati diri bangsa Indonesia. Penelitian ini menganalisis peran Pancasila sebagai sistem filsafat, mencakup sumber historis, sosiologis, dan politisnya, serta mengidentifikasi dinamika, tantangan, dan urgensinya. Pancasila merupakan satu kesatuan mutlak yang bersifat majemuk tunggal dan koheren, digambarkan dalam kesatuan hierarkis piramidal. Nilai-nilainya berakar pada proses panjang sejarah Nusantara sebagai asas peradaban dan kearifan lokal. Secara politis, Pancasila diformalkan sebagai *Weltanschauung* pandangan dunia oleh para pendiri bangsa, berfungsi sebagai konsensus ideologis yang krusial untuk mempersatukan dan menyelamatkan negara dari disintegrasi. Dalam perjalanannya, Pancasila mengalami dinamika signifikan: dari konsep teoritis Filsafat Groundslag di Era Orde Lama, menuju implementasi praktis *Weltanschauung* melalui Penataran P-4 di Era Orde Baru. Namun, ia menghadapi penurunan eksistensi dan resonansi filosofis di Era Reformasi. Tantangan ideologis global utama yang dihadapi adalah Kapitalisme, yang mengancam Keadilan Sosial melalui kebebasan individual berlebihan, serta Komunisme, yang menghilangkan peran rakyat melalui dominasi negara yang ekseseif.

ABSTRACT

Pancasila is recognized not only as the foundation of the state, but also as a fundamental philosophical system. This philosophical system provides the basis for the state's worldview, way of thinking, and policies, which are deeply rooted in the identity of the Indonesian people. This study analyzes the role of Pancasila as a philosophical system, covering its historical, sociological, and political sources, as well as identifying its dynamics, challenges, and urgency. Pancasila is an absolute unity that is singularly diverse and coherent, described in a pyramidal hierarchical unity. Its values are rooted in the long history of the archipelago as the basis of civilization and local wisdom. Politically, Pancasila was formalized as a *Weltanschauung* worldview by the founders of the nation, serving as a crucial ideological consensus to unite and save the country from disintegration. Over time, Pancasila has undergone significant dynamics: from the theory in the New Order era. However, it faced a decline in its existence and philosophical resonance in the Reformation era. The main global ideological challenges faced are capitalism, which threatens social justice through excessive individual freedom, and communism, which eliminates the role of the people through excessive state domination.



Pendahuluan

Teks Pancasila adalah pedoman inti atau dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari lima sila yang merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila tidak hanya mencakup rumusan normatif saja, tetapi juga berisi dan mencakup sistem filsafat. Dalam konteks ini, Pancasila memberi dasar bagi cara berpikir, pandangan hidup, dan kebijakan negara yang berakar pada jati diri dan karakter bangsa. Setiap sila dalam Pancasila menggambarkan nilai-nilai umumnya: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang berperan sebagai fondasi kuat bagi berbagai aspek kehidupan (Faslah, 2025).

Pada sistem filsafat, Pancasila bukan hanya berperan sebagai dasar hukum atau panduan dalam kehidupan bernegara, tetapi juga mencakup nilai-nilai fundamental yang memberikan arah bagi pandangan hidup serta membentuk kerangka berpikir yang setara dengan tujuan dan kepribadian bangsa. Dalam perkembangannya, Pancasila menghadapi dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor historis, sosiologis, dan politis yang membentuk pemahamannya. Maka karena itu, Begitu penting untuk mencerna makna Pancasila lebih mendalam perannya untuk sebuah sistem filsafat, termasuk bagaimana sejarah, kondisi sosial, serta dinamika politik yang mempengaruhi penerapannya (Febriansyah, 2017).

Oleh karena itu, penulisan makalah ini berfokus untuk menggali sumber politis, historis, dan sosiologis yang melandasi lahirnya system filsafat negara berupa pancasila. Dengan mengkaji sumber-sumber tersebut, diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk memberi kepastian dan penekanan bahwasanya Pancasila dapat terus sebagai landasan yang kokoh dalam menghadapi tantangan masa kini dan menjadi pedoman dalam merealisasikan masyarakat yang Sejahtera, adil, dan makmur.

Pembahasan

Teks “Pancasila” sebagai dasar bangsa Indonesia yang memiliki peran sangat penting tidak hanya dalam struktur hukum, bahkan juga dalam konteks filsafat. Sebagai sistem filsafat, dasar ini merupakan pandangan hidup yang mendalam dan terstruktur yang mengarahkan cara menalar dan patokan dasar Indonesia. Dengan lima sila yang saling berhubungan, Pancasila memberikan landasan filosofis yang memperkuat persatuan, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan bernegara (Rahayu, 2025).

Pengertian Pancasila

Pancasila merupakan landasan pemikiran mendalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, suatu hal yang secara resmi ditetapkan melalui PPKI tepat di tanggal 18 Agustus 1945, serta termuat di bagian mukadimah UUD 1945. Dalam kapasitas sebuah tatanan pemikiran maupun sudut pandang universal, Lima Asas ini berwujud keutuhan. Pancasila berakar dari istilah “Panca” yang bermakna lima, dan “Sila” yang menunjukkan landasan, pilar, kaidah, atau ketentuan moralitas yang vital dan luhur (Asshiddiqie, 2021).

Lima Asas itu tersusun atas lima bagian (prinsip) yang mana setiap prinsipnya mengandung kaidah dan kegunaan (peran). Namun, keseluruhan ini mengandung untaian suatu tujuan spesifik, yakni berupa sebuah komunitas yang sejahtera dan damai. Inti dari Pancasila yaitu lima prinsip yang menjadi landasan kehidupan bernegara, antara lain: “Kepercayaan kepada Tuhan yang Tunggal”, “Humanitas yang Beretika dan Berkeadilan”, “Keutuhan Bangsa Indonesia”, “Kedaulatan Rakyat yang Diarahkan oleh Kematangan Akal Budi dalam Musyawarah/Representasi”, dan “Pemerataan Kesejahteraan untuk Seluruh Warga Negara Indonesia.”

Pada dasarnya, isi dari setiap sila tersebut menggambarkan asas peradaban (Febriansyah, 2017). Akan tetapi, setiap sila tersebut semuanya merupakan “satu kesatuan utuh dan bulat.” Setiap poin pancasila merupakan bagian dari kesatuan pancasila maka pancasila adalah satu kesatuan mutlak yang bersifat majemuk tunggal. Pancasila yang terdiri dari lima sila tersebut pada dasarnya adalah suatu sistem filsafat.

Sistem Filsafat

Definisi sistem adalah sebuah keutuhan komponen-komponen yang berinteraksi, bersinergi untuk menggapai suatu target spesifik, dan secara menyeluruh membentuk satu kesatuan yang integral (Budiman et al., 2024). Dalam peranannya sebagai sebuah tatanan, Pancasila juga mempunyai elemen-elemen berupa lima prinsip yang berkolaborasi sebagai satu kesatuan falsafah. Suatu sistem umumnya memiliki karakteristik seperti berikut: dimulai dengan suatu keutuhan komponen-komponen yang masing-masing memiliki peran tersendiri, dan terjadi interkoneksi serta keterikatan timbal balik di antara mereka. Keseluruhan struktur ini dimaksudkan untuk meraih suatu tujuan yang jelas dan beroperasi di dalam suatu kondisi yang rumit. Akhirnya, sistem ini tersusun atas komponen-komponen yakni prinsip-prinsip Pancasila, di mana setiap prinsip pada intinya merupakan satu kaidah mandiri dengan fungsi tersendiri, tetapi secara totalitas tetap menjadi satu keutuhan yang terstruktur (sistematis).

Sementara itu, istilah falsafah bermula dari bahasa Hellenic yaitu “Philosophia” yang dirangkai dari kata “philos” yang mengacu pada rasa kasih atau “philia” yang berarti relasi kekerabatan, yang juga merujuk pada ketertarikan terhadap kata “sophos” yang maknanya adalah kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, kecakapan, pengalaman aplikatif, serta kecerdasan. Secara ringkas, falsafah merupakan usaha mempertimbangkan sesuatu secara komprehensif dan tajam guna memahami nilai-nilai fundamental yang diterapkan dalam eksistensi, misalnya kebenaran, kesetaraan, dan etika (Wahid, 2021). Bila dipandang sebagai suatu kerangka pemikiran, Pancasila mengintegrasikan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman hidup bernegara.

Pancasila memiliki kedudukan penting sebagai dasar pemikiran dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila diperlukan agar masyarakat mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara kontekstual dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan sosial, politik, dan kebangsaan. Dengan memahami substansi Pancasila secara komprehensif, individu dapat mengembangkan cara pandang yang lebih terbuka terhadap berbagai persoalan kontemporer sekaligus menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai dasar negara melalui pendidikan dan penyuluhan Pancasila menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran kebangsaan, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa (Adityo, 2022).

Sumber Politis, historis, dan sosiologi “Pancasila” Sebagai “Sistem Filsafat”

Dipandang sebagai kerangka filosofis, Pancasila lahir dari lintasan riwayat panjang negara Indonesia yang dipenuhi perjuangan dan konflik demi mencapai kemandirian. Posisi Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia tidak hanya mencakup dimensi pemikiran mendalam (filosofis), tetapi juga memiliki keterikatan kuat dengan aspek sejarah, kemasyarakatan (sosiologis), dan tata negara (politis) (Faslah, 2025).

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis

Penelusuran terhadap prinsip-prinsip Pancasila sebagai sistem falsafah dapat dilacak dalam perjalanan sejarah masyarakat Nusantara sebagai berikut: Nilai Ketuhanan yang Maha Esa telah mengakar dalam kehidupan publik bangsa, yang terbukti sejak masa lampau hingga saat kemerdekaan. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam komunitas Indonesia muncul dari perpaduan pengalaman bangsa sepanjang sejarah; bangsa bahari ini telah melanglang buana ke berbagai wilayah dan pengalaman ini membentuk jati diri bangsa yang dijuluki Soekarno sebagai Perikemanusiaan. Konsep Persatuan Indonesia menggambarkan suatu keutuhan di tengah kebinekaan serta gabungan antara masa kini dan masa lalu, menunjukkan Indonesia sebagai negara majemuk yang mengagumkan karena keragaman dapat terintegrasi. Selanjutnya, prinsip Kerakyatan berakar pada gagasan bahwa demokrasi sebagai wujud pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan bagi rakyat, merupakan fenomena baru yang hadir sebagai konsekuensi pembentukan negara republik yang berdaulat, mengingat kerajaan pra-Indonesia umumnya dikendalikan oleh raja-raja otoriter. Terakhir, cita-cita Keadilan Sosial—yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera—adalah harapan yang telah membara ratusan tahun dalam keyakinan bangsa dan terukir dalam pepatah "Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja."

Akar kemasyarakatan (sosiologis) Pancasila sebagai kerangka falsafah dibagi menjadi dua kelompok: masyarakat umum yang memahaminya sebagai pandangan hidup (way of life) dalam agama, adat, dan budaya; dan kalangan akademisi yang menelaahnya secara ilmiah. Bagi masyarakat umum, elemen-elemen filosofis Pancasila masih berwujud petunjuk praktis yang diperkuat oleh fakta bahwa masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang taat beragama sejak animisme hingga monoteisme. Menurut (Samho & Setiawan, 2015), Pancasila adalah suatu keutuhan integral yang mustahil dipisahkan; prinsip-prinsipnya saling berhubungan dan terhubung secara koheren, digambarkan dalam hubungan hierarkis piramidal serta hubungan timbal balik yang saling melengkapi.

Dari sisi politik, Pancasila adalah kesepakatan politik yang kemudian berevolusi menjadi struktur pemikiran. Sumber politis mencakup diskusi politik mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dalam sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno yang meluncurkan konsep *Philosophische Grondslag*, yaitu landasan filosofis negara yang ditempatkan sebagai basis spiritual. Soekarno juga menegaskan kedudukan Pancasila

sebagai *Weltanschauung* yang dapat mempersatukan dan menyelamatkan negara Indonesia dari perpecahan bangsa. Sumber politik ini juga diperkuat oleh konsensus penggunaan lambang-lambang dalam kehidupan bernegara, seperti Bendera merah putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya, yang semuanya merupakan simbol negara Indonesia. Dengan mendalami ketiga aspek ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila bukan sekadar suatu pedoman, tetapi juga hasil dari proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen sejarah, masyarakat, dan politik Indonesia.

Dinamika dan Tantangan Filosofis

Perkembangan (Dinamika) Pancasila sebagai kerangka pemikiran memperlihatkan bagaimana nilai-nilai fundamental bangsa ini berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pada Era Orde Lama (Soekarno), Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal sebagai “Filsafat Groundslag”, yaitu perenungan filosofis yang dimaksudkan menjadi landasan spiritual namun bersifat konseptual, di mana Soekarno menekankan Pancasila sebagai falsafah yang terlahir dari percampuran budaya. Di Era Orde Baru (Soeharto), Pancasila bergeser ke arah aplikatif, disebut *weltanschauung*, yang berarti Pancasila tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga berfungsi sebagai patokan dalam menjalani hidup sehari-hari, yang dikembangkan menjadi program pelatihan P-4 untuk pengamalan nilai. Sayangnya, pada Era Reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang menonjol dan seolah-olah tenggelam dalam arus sejarah masa lalu, sehingga dianggap tidak lagi relevan dengan dialektika reformasi, meskipun resonansinya masih terdengar di kalangan akademik.

Namun, Pancasila juga menghadapi hambatan dalam bentuk ideologi global. Tantangan pertama adalah Kapitalisme, sebuah aliran yang meyakini kebebasan individual dan perakuan untung sebesar-besarnya sebagai cara menyejahterakan rakyat. Dampaknya berupa pemberian kebebasan individual yang berlebihan, yang dapat membawa dampak negatif, seperti monopoli dan gaya hidup konsumerisme. Tantangan kedua adalah Komunisme, aliran yang berpendapat bahwa negara memegang kepemilikan modal demi menyejahterakan masyarakat secara merata. Hambatan dari komunisme adalah negara mendominasi secara ekstrem sehingga peran masyarakat dalam kehidupan bernegara menghilang. Meskipun menghadapi banyak kendala, Pancasila tetap menjadi pedoman esensial yang menjaga harmoni dan kedamaian bangsa, dan nilai-nilai Pancasila perlu senantiasa dipahami dan diterapkan oleh generasi mendatang.

Esensi dan Urgensi

Sebagai keyakinan kolektif, Pancasila memuat nilai-nilai substansial (esensi) dan nilai penting (urgensi) yang mendalam dan berperan besar dalam membentuk pandangan hidup dan moralitas bangsa. Hakikat (esensi) Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal berikut: Hakikat Sila Ketuhanan adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip tertinggi, menuntut kesadaran akan kemandirian sekaligus tanggung jawab tertinggi kepada Sang Pencipta. Hakikat Sila Kemanusiaan adalah memandang manusia sebagai makhluk majemuk tunggal (*monopluralis*), yang mencakup *dwi-tunggal jiwa/raga*, *individu/sosial*, dan *pribadi otonom/makhluk Tuhan*.

Hakikat Sila Persatuan berkaitan dengan semangat nasionalisme, diwujudkan dalam kecintaan terhadap tanah air dalam tiga jenis: fisik, formal (negara hukum), dan mental (imajinasi ideologis). Hakikat Sila Kerakyatan terletak pada prinsip konsultasi (musyawarah) untuk mencapai kesepakatan, bukan sekadar membenarkan pendapat mayoritas. Terakhir, Hakikat Sila Keadilan terwujud dalam tiga dimensi: keadilan distributif (membagi dari negara), keadilan legal (ketaatan warga negara), dan keadilan komutatif (adil antar sesama warga) (Judijanto et al., 2024).

Pentingnya (Urgensi) Pancasila sebagai kerangka filsafat memiliki tujuan mendesak. Pertama, menempatkan Pancasila sebagai struktur pemikiran dapat mengembalikan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bebas dalam politik, hukum, dan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Kedua, ia membangun pola pikir yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi global. Ketiga, ia dapat menjadi titik tolak untuk menghadapi ancaman globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan pondasi perekonomian. Keempat, Pancasila dapat menjadi panduan hidup (way of life) sekaligus cara berpikir (way of thinking) bangsa Indonesia guna menjaga keseimbangan dan konsistensi antara perbuatan dan pemikiran. Esensi dan nilai penting Pancasila sebagai kerangka filsafat terlihat dalam bagaimana setiap prinsip memiliki nilai yang krusial untuk kehidupan bangsa, dan dengan menerapkan Pancasila, kita dapat menjaga identitas bangsa dan menciptakan kehidupan yang lebih bermutu (Putri et al., 2025).

Kesimpulan dan Saran

Pancasila merupakan fondasi negara Indonesia yang menyimpan nilai-nilai pemikiran mendalam (filosofis) yang substansial. Sebagai suatu kerangka filsafat, Pancasila tidak sekadar berfungsi sebagai dasar hukum atau pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai ideologi yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan dalam eksistensi bermasyarakat. Dalam perkembangannya, Pancasila menghadapi perubahan (dinamika) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, kemasyarakatan, dan tata negara yang membentuk konsepsinya. Sebagai sebuah falsafah, Pancasila juga menghadapi hambatan, yakni Kapitalisme dan Komunisme. Meskipun demikian, hakikat (esensi) dan nilai penting (urgensi) Pancasila tetap krusial sebagai panduan dalam mewujudkan komunitas yang adil, beradab, dan bersatu. Oleh sebab itu, sangat mendesak untuk lebih mendalami Pancasila sebagai sistem filsafat, termasuk bagaimana riwayat, situasi sosial, dan perubahan politik yang memengaruhi penerapannya, agar kita dapat mengapresiasi dan mengaplikasikannya dengan lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah melihat temuan dan ikhtisar dari tulisan ini, ada beberapa anjuran dari saya sebagai penulis ada hal hal yang perlu disampaikan. Kepada pembaca, diharapkan untuk memahami bahwa Pancasila sebagai struktur pemikiran tidak hanya bersifat normatif (hukum), tetapi juga mempunyai akar sejarah, kemasyarakatan, dan politik yang kokoh dalam masyarakat Indonesia. Maka, penting bagi kita untuk menjunjung tinggi dan memelihara nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Para pembaca juga diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan penuh pertimbangan

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mendalami riwayat dan makna di balik nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjaga keharmonisan dan keutuhan di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2022). Penguatan Dasar Negara Melalui Penyuluhan Pancasila Pada Mahasiswa. *Devosi*, 3(2), 1–5. <https://repository.uin-malang.ac.id/11455/>
- Asshiddiqie, S. H. J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Budiman, D., Datya, A. I., Wartono, T., Judijanto, L., Sudipa, I. G. I., Kurniawan, H., Rakhmadani, D. P., Pasrun, Y. P., & Setiono, D. (2024). *Sistem Informasi Manajemen: Panduan Praktis dalam Pembangunan Sistem Informasi Manajemen*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Faslah, R. (2025). *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1–27.
- Judijanto, L., Mawara, R. E., Winarto, B. R., Subakdi, S., Irawatie, A., Ikhwanudin, I., Hardiyanto, L., & Dameria, M. (2024). *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putri, V. F. A., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme Konstruktif Dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila Yang Relevan di Era Globalisasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Rahayu, A. S. (2025). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Paradigma Baru dalam Menanamkan Nilai Bangsa*. Bumi Aksara.
- Samho, B., & Setiawan, R. (2015). *Mengartikulasi Pancasila Menjadi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia yang Majemuk: Sebuah Kajian Filosofis*. Research Report-Humanities and Social Science, 2.
- Wahid, M. (2021). *Filsafat Umum: Dari filsafat Yunani kuno ke filsafat modern*. Penerbit A-Empat.